

**ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI DESA TALONTAM BENAI KECAMATAN BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara**



Oleh:

**NOVIANTI CAHYANI
NPM 160411080**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

LEMBARAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (stara satu), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun sekolah tinggi atau universitas lainnya;
2. Karya tulis ini adalah penelitian saya sendiri dan dibantu oleh dosen pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat pertimbangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan sanksi norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Teluk Kuantan, September 2020

Yang membuat pernyataan

NOVIANTI CAHYANI

NPM 160411080

MOTTO

*"Hanya Pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan,
tanpa pendidikan indonesia tak mungkin bertahan."*

(Najwa Shihab)

*Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan harta, demi
memperoleh uang untuk memperkaya dirimu. Belajarlah supaya tidak
menjadi orang bodoh dan dibodohi orang lain.*

(Ulamarir Rahman)

*“Tujuan Pendidikan itu untuk mempertajam Kecerdasan,
Memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan ”*

(Tan Malaka)

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini kepada:

Ayahanda tercinta Firman Edi dan Ibunda Yang kusayangi

Raja Teri Sumarni, sebagai terimakasih atas semua jerih payah,

perngorbanan serta keringat yang kalian curahkan demi

pendidikan anakmu yang tidak akan mampu terbalaskan sampai

kapanpun, terimakasih bapak terimakasih ibu atas doa dan

dukungan selama ini.

Tidak lupa kepada Adik-adikku Anisa Putri dan Gisela Oktari Humaira Dan

keluarga besarku dan sahabat terbaik yang senantiasa memberikan doa dan

dukungan selama proses pendidikan berlangsung dan akhirnya dapat

menyelaskan karya yang sederhana ini.

Almamater tercinta Universitas Islam Kuantan Singgingi

By: Novianti Cahyani

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TALONTAM BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

NOVIANTI CAHYANI

NPM 160411080

Pertimbangan yang mendasari penelitian ini, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah Desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan Desa menjadi lebih baik, terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator yang digunakan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 31. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan 20 Informan yang berasal dari masyarakat dan BPD. Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan desa (BPD) di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Belum Tercipta dengan Baik.

Kata Kunci: Fungsi, BPD

ABSTRACT**ANALYSIS OF FUNCTION OF REGIONAL AGENCY (BPD)****IN THE TALONTAM BENAI VILLAGE BENAI DISTRICT, KUANTAN
SINGINGI REGENCY****BY
NOVIANTI CAHYANI****NPM 160411080**

The considerations that underlie this research, that the village consultative body (BPD) is a solid partner of the village government in developing and prospering the people. It is hoped that the village government and the village consultative body (BPD) can bring progress by providing direction and input in building a better village government, especially in the formulation and enactment of village regulation (Perdes). This study aims to determine the Analysis of the function of the village consultative body (BPD) in the Talontam Benai Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. The indicators used are based on law number 6 of 2014 article 31. The research method used was qualitative with 20 informants who came from the community and BPD. The results of this study found that the function of the consultative body (BPD) in the Talontam Benai Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency has not created properly.

Keywords: *Function, BPD*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt yang mana berkat Rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri judul “**Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi**”

Shalawat dan salam tak lupa penulis ucapkan buat Baginda Nabi Besar Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli surga. Amiin.

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singgingi

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan termakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singgingi
2. Bapak Zul Amar, SE. ME Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singgingi.
3. Bapak Desriadi S,Sos. M, Si, sebagai Ketua Prodi Administrasi Negara.
4. Bapak Emilia Emharis S.Sos M, Si sebagai Pembimbing 1 saya yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Sahri Muhamarram S.Sos M, Si sebagai Pembimbing 2 saya yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Keluarga tercinta, Ayahnya (Firman Edi), Ibunda (Raja Teri Sumarni) yang menanamkan ajaran bahwa “Hidup adalah sebuah perjuangan, setiap keberhasila harus dilalui dengan sebuah perjuangan”, serta buat Adinda (Anisa Putri dan Gisela Oktari Humaira) senantiasa memberikan semangat dan bantuan sehingga skripsi ini terselesaikan
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
8. Kepala Desa Talontam Benai dan Ketua BPD Desa Talontam Benai.
9. Untuk sahabat-sahabatku Mahfira Yana, Dan Chindy Oktari yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, dan teman-temanku yang senasib dan seperjuangan khususnya Jurusan Administrasi Negara angkatan 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas segala amalan dan kebaikan dengan pahala yang setimpal.

Demikianlah, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapan terima kasih.

Teluk Kuantan, September 2020

Penulis

NOVIANTI CAHYANI

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2.Perumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian	8
BAB II: LANDASAN TEORI.....	9
2.1. Kajian Pustaka	9
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara	9
2.1.2.Teoru/Konsep Manajemen.....	14

2.1.3.Teori/Konsep Organisasi	18
2.1.4.Teori/Konsep Otonomi Desa	28
2.1.5.Teori/Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	31
2.2 Kerangka Pemikiran.....	33
2.3 Hipotesis Kerja.....	34
2.4 Konsep Operational	34
2.5 Operational Variabel.....	35
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1.Jenis Penelitian.....	36
3.2.Informan Penelitian.....	36
3.3.Sumber Data.....	37
3.4.Fokus Penelitian.....	38
3.5.Lokasi Penelitian.....	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7.Teknik Analisis Data	40
3.8. Waktu Penelitian.....	41
BAB IV: GAMBARAN DAN LOKASI PENELITIAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.2 Keadaan Geografis.....	43
4.3 Keadaan Penduduk.....	45
4.4 Agama	47

BAB V: HASIL PENELITIAN	55
5.1 Identitas Informan Penelitian.....	55
5.1.1 Informan Menurut Jenis Kelamin	55
5.1.2 Informan Menurut Kelompok Umur.....	56
5.1.3 Informan Menurut Tingkat Pendidikan	57
5.1.4 Informan Menurut Status Pekerjaan	58
5.2 Hasil Penelitian	58
5.2.1 Indikator Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	59
5.2.2 Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.....	64
5.2.3 Indikator Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.....	69
BAB VI: PENUTUP	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 : Operational Variabel Penelitian	35
Tabel 3.1 : Informan penelitian.....	37
Tabel 3.2 : Rancangan Kegiatan Penelitian	41
Tabel 4.1 : Tabel jumlah Desa Di Kenegrian Benai	42
Tabel 4.2 : Tabel jumlah Desa Di Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi	44
Tabel 4.3 : Data Penduduk Desa Talontam Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.	45
Tabel 4.4 : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Talontam Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.	46
Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Talontam Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi	46
Tabel 4.6 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Desa Talontam Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.....	47
Tabel 4.7 : Sarana Pendidikan di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi	47
Tabel 4.8 : Agama yang di anut di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi	48
Tabel 4.9: Sarana Peibadatan di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai	

Kabupaten Kuantan Singingi.	48
Tabel 5.1 : Karakteristik Informan di Lihat dari Jenis Kelamin	55
Tabel 5.2 : Karakteristik Informan menurut Umur	56
Tabel 5.3 : Karakteristik Informan menurut Tingkat Pendidikan	57
Tabel 5.4 : Karakteristik Informan menurut status pekerjaan.....	58

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1. Kerangka pemikiran	42
Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi.....	49
Gambar 4.2:Sruktur Organissi Badan Permusyawaratan Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah pemerintahan Desa. Sehingga pemerintahan Desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pemerintahan terkecil, Pemerintahan Desa membawa amanat sebaagai pelaksana pemerintahan Negara yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga pemerintahan Desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan Negara dalam konstitusi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa bukan lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi Daerah mandiri, sehingga Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan supaya menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah Desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga ini adalah Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah Desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan Desa menjadi lebih baik, terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes).

Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada Regulasi Desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah

pemerintah Kabupaten.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”

Dalam pemerataan pembangunan di Desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan

tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan Desa. Pembangunan Desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun Desa kearah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa :

“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik Desa dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai keputusan bersama.

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja

Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berasangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi

mayarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan fungsi BPD di Desa Talontam Benai Kabupaten Kuantan Singgingi masih belum optimal. Ada pun permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi belum

optimal dikarenakan adanya permasalahan diantaranya, masih ada anggota BPD yang belum memahami betul fungsinya, kemudian selain itu rapat internal BPD tidak pernah lengkap dan juga masih adanya aspirasi masyarakat yang belum terserap. Padahal sangat jelas bahwa fungsi BPD sangat berperan penting dalam menghimpun aspirasi masyarakat dikarenakan BPD adalah perwakilan masyarakat.

2. Kurangnya partisipasi anggota BPD dalam menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa padahal Kepala Desa telah mengundang BPD sehingga menyebabkan tidak sejalannya pemikiran antara kepala desa dengan anggota BPD.
3. Tidak berjalannya fungsi BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat terhadap masyarakat Desa, ditandai dengan BPD tidak melakukan kerjasama dengan Kepala Desa untuk rapat dan dibahas dalam perencanaan pembangunan seperti jalan yang masih belum baik, padahal masyarakat sudah menyampaikan rekomendasi kepada BPD.
4. Kurangnya kemampuan BPD dalam membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Selama ini Kepala Desa yang menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut.
5. Serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang masih kurang berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, oleh karena itu penlitii tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan salah satu fungsi BPD yaitu

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desadi Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Maka penulis meneliti yang berjudul.

“Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?”

1.3 Tujuan Penelitian

“Untuk mengetahui Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan bermanfaat bagi peneliti berikutnya untuk meneliti permasalahan yang sama di Desa Talontam Benai dengan masalah yang berbeda.
2. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan pemerintah dalam pengembangan masyarakat yang melibatkan memberdayaan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut adminitrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibumbuhinya oleh awalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maskud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya.

Konsep administrasi oleh Waldo Lih (dalam Faried Ali 2015:187) adalah kerja sama manusia yang didasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan bersama (sesuatu yang sekedar ada dalam pemikiran). Dalam konsep ini kerjasama manusia yang disebut administrasi, bila secara konseptual kerja sama itu terbentuk karena perimbangan rasio. Begitu banyak kegiatan terjadi atau kegiatan yang melibatkan manusia dengan manusia pada suatu kerja sama, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai “Konsep Administrasi”. Beberapa orang berkumpul di suatu tempat karena suatu peristiwa yang menarik misalnya kecelakaan lalu lintas, tidak dapat dikatakan administrasi. Ia akan tampak sebagai suatu kerja sama manusia yang disebut administrasi, bila secara konseptual kerja sama itu berbentuk karena pertimbangan rasio.

Menurut Faried Ali (2015:187) manusia memiliki potensi yang secara rasional dapat membentuk hubungan kerja sama antara sesamanya ketika tujuan yang hendak mereka capai memiliki kesamaan, pada bentuk kerja sama demikian, kerjasama dapat dikonsepsikan sebagai “administrasi”. Sebagai konsep

keberadaannya masih sekedar ada dalam pemikiran, ia belum tampak sebagai hal yang konkret, dalam bentuknya maupun isinya, dan bagaimana kerjasama itu berlangsung.

Sondang P. Siagian (dalam Inu Kencana syafiie 2016:5) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

The liang gie (dalam Afifuddin 2012:5) mendefenisikan Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Prajudi Atmosudirjo (dalam Afifuddi 2012:5) Administrasi merupakan suatu fenomena sosial,yaitu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barangsiapa hendak mengetahui administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi.

Pasalong (2011:3) Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efesien , efektif dan rasional sedangkan dimensi unsure-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan.

- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Juharni (2015:1) administrasi negara (Publi Administration) adalah suatu “species” dalam lingkup “genus” administrasi (administration) yang bermakna sebagai kegiatan manusia yang koperatif.

Sementara itu administrasi negara menurut Tjokromidjojo dalam Listyningsih (2014:4) memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Formulasi

Formulasi adalah perumusan kebijakan merupakan langkah awal dalam penyelenggaraan negara berupa perumusan kebijakan yang akan dijadikan pedoman negara. kebijakan yang diambil tergantung dari analisa yang baik atas keadaan-keadaan yang nyata. Perumusan kebijakan juga harus meliputi usaha untuk memproyekti kenyataan-kenyataan sekarang dalam keadaan masa depan dengan cara melakukan *forecast* (perkiraan dari perkembangan yang mungkin terjadi dan dalam penyusunan berbagai alternatif langkah kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan,

b. Pengaturan

Pengaturan adalah pengendalian unsur-unsur administrasi, yang dimaksud unsur-unsur administrasi adalah organisasi dan tata kerjanya, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan dan mengendalikan ke empat unsur

administrasi tersebut diatas dalam rangka pencapaian tujuan administrasi negara.

- c. Penggunaan dinamika administrasi, yang meliputi : *pertama*, pimpinan sebagai penggerak proses administrasi melalui pemberian motivasi oleh pimpinan kepada bawahan.faktor impinan sangat menentukan berhasil tidaknya proses administrasi. *Kedua*, Koordinasi, penggerak yang bersifat menyerasikan kegiatan antar bagian dalam proses administrasi dan agar selalu mengarah pada pencapaian tujuannya. Pada prakteknya, tahap ini seringkali ditemui beberapa hambatan yang akan mempengaruhi berhasil tidaknya penyelenggaraan sebuah negara. *Ketiga*, Pengendalian dan pengwasan, agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana dan dapat diambil tindakan korektif sedini mungkin apabila terdapat penyimpangan dan hambatan. Pengendalian dapat dilakukan dari dalam organisasi yaitu oleh pimpinan organiasasi yang bersangkutan sehingga bisa memberi koreksi secara langsung. Sementara pengawasan disini ditekankan pada korektif dari luar organisasi, dan bisa memberikan korektif namun tidak secara langsung. *Keempat*, komunikasi, agar terbina rasa kebersamaan dan kesamaan visi, misi dan tujuan antara anggota organisasi. Komunikasi yang terjalin dengan baik akan mempermudah dalam pelaksanaan administrasi.

Administrasi Negara merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan negara. Administrasi negara merupakan suatu proses pengendalian usaha (proses pelaksanaan kegiatan) dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan

negara. Kemudian administrasi negara juga dapat dikatakan keseluruhan penyelenggaraan kegiatan negara dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas pemerintahan.

Administrasi negara adalah memberikan beberapa definisi berdasarkan empat kategori yaitu: a) Politik, administrasi publik sebagai apa yang dikerjakan pemerintah baik lansung maupun tidak lansung, sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, implementasi kepentingan publik, dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan secara individu. b) Legal/Hukum, administrasi publik sebagai penerapan hukum, regulasi, sebagai pemberian sesuatu dari penguasa kepada rakyatnya. c) Manajerial, administrasi publik adalah fungsi eksekutif dalam pemerintahan, sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen. d) Mata pencaharian, administrasi publik sebagai suatu bentuk propesi mulai dari tukang sapu sampai ahli sesuatu di sektor publik dimana semua mereka tidak sadar bahwa mereka adalah administrasi publik.

Menurut Nigro (dalam Lystianingsi 2014:3) administrasi negara adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu Yudikatif, Legisatif dan Eksekutif, mempunyai suatu peran penting dalam memformulasikan kebikan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik.

Hal terpenting dalam administrasi Negara: *pertama*, tujuan. Setiap kegiatan administrasi negara mengandung unsur tujuan dan kebijakan yang perlu ditetapkan dan diusahakan untuk dicapai. *Kedua*, kerjasama. Adaministrasi negara

adalah bentuk kerjasama baik antar manusia maupun antara lembaga/instansi baik swasta maupun pemerintah, artinya dalam terbentuk unsur kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan negara. *Ketiga*, proses kgiatan. Administrasi negara adalah sebuah proses, artinya terdapat suatu proses kegiatan usaha yang teratur, pengendalian usaha dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi jalannya pencapaian tujuan. *Keempat*, sarana. Dalam penyelenggaraan administrasi negara dibutuhkan adanya sarana dan prasarana baik dalam bentuk daya maupun dana termasuk juga peralatan untuk menunjang pembangunan termasuk di dalamnya infrastruktur dalam menunjang penyelenggaraan negara.

2.1.2 Teori/Konsep Manajemen

Inu Kencana Syafiie (2010:48) Secara etimologi, management (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata manus (tangan) dan agere (melakukan), dan setelah digabung menjadi kata manage (bahasa Inggris) berarti mengurus atau menagiere (bahasa Latin) yang berarti melatih.

Menurut George Terry (dalam Inu Kencana Syafiie 2010:49) manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia

Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *management* yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur dan mengelola. Kata *manage* ini berasal dari Italia *Maneggio* yang diadopsi dari bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus* yang artinya tangan (Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2011:230). Sedangkan dalam kamus besar bahas

Indonesia kata menejemen mempunyai pengetian sebagai penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran (Yuku, 2013:29). Dalam arti khusus manajemen dipakai bagi pemimpin dan kepemimpinan yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin dalam suatu organsasi

Menurut Prajudi (dalam Syafiie 2010:49), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu. Sedangkan menurut George Terry (2010:49), manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Menurut Bittle (dalam Silalahi 2011), dalam tataran praktis pengertian manajemen dibagai kedalam beberapa defenisi, antara lain bahwa manajemen menentukan kerja tim, delegasi, dan hasil. Manajemen mengakui presensi intuitif, keterampilan subjektif dalam proses manajemen dan pertumbuhan penting nya pengetahuan yang teruji sebagai satu petunjuk untuk keputusan dan tindakan manajerial. Disisi lain, manajemen didefinisikan sebagai suatu badan pengetahuan yang dapat di ajarkan, diperlukan untuk pelajaran sekolah, lembaga dan insitusi-insitusi. Manajemen adalah apa yang manajer kerjakan dalam pelaksanaan peranan mereka sebagai manajer.

Menurut Sikukula (dalam Hasibun 2009:6), manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian,

penetapan, pengarahan, pemotivasiyan, komunikasi dan penambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sebagais semberdaya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Menurut Terry (dalam Zulkifli 2014:18), mendefenisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating, dan controling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Menurut Stone, et.al (dalam Zulkifli 2014:17), manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Taylor (dalam Hayat, 2017:10), manajemen adalah ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan anda kerjakan, selanjutnya mengakaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah.

Menurut Dian Ari Nugroho (2017:2), manajemen merupakan proses pencapaian tujuan yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi agar kegiatan tersebut berjalan efektif dan efisien.

Selanjutnya Menurut Terry dan Rue (dalam Sundari, 2011:17), manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau

pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Sedangkan menurut Siswandi (2011:1), manajemen sebagai pengaturan dan kerja sama unsur-unsur manusia dan sarana pendukung (alat-alat) untuk mencapai tujuan (organisasi) secara efektif dan efisien.

sedangkan menurut Kadarisman (2018:16), manajemen adalah suatu keahlian untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi suatu tujuan.

Fungsi-fungsi manajemen atau disebut juga sebagai unsur-unsur menejemen menurut Usman Effendi (dalam Inu Kencana Syafiie 2010:18) ada empat yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*) merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya;
2. Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar
3. Kepemimpinan (*Learning or Actuiting*) berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan

lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang- orang lain melakukan tugas-tugas yang esensial. Kepemimpinan termasuk di dalamnya oenggerang (actuiting) yaitu melakukan penggerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas- tugasnya.

4. Pengendalian (*Controlling*) merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak kearah tujuan.

2.1.3 Teori/Konsep Organisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian- bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan tujuan tertentu atau kelompok kerja sama antara orang- orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut James D. Money (dalam Inu Kencana Syafiee 2010:51) organisasi adalah sebagai bentuk seperti perserikatan orang- orang untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Usman Effendi (2014: 130) organisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu organisasi formal dan informal. Organisasi formal adalah suatu sistem mengenai aktivitas- aktivitas yang berkoordinasikan dari sekelompok orang yang berkerjasama kearah suatu tujuan bersama. Sedangkan organisasi informal adalah

kumpulan hubungan antar perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan tak disadari untuk tujuan bersama.

2.1.3.1 Perilaku Organisasi

Menurut Wursanto (2003:81) mempelajari perilaku organisasi berarti mempelajari perilaku para anggota organisasi, baik secara individu maupun secara kelompok. Mempelajari perilaku organisasi bukan memperlajari bagaimana organisasi itu berprilaku, tetapi mempelajari bagaimana para anggota organisasi itu berprilaku. Mempelajari bagaimana para anggota organisasi berprilaku berarti mempelajari perilaku manusia. Memahami perilaku manusia adalah suatu hal yang sulit karena setiap manusia sebagai individu mempunyai perilaku berbeda.

Perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

- a. Perilaku Internal, adalah perilaku-perilaku yang dipengaruhi oleh faktor genetika, yaitu segala hal yang dibawa sejak orang lahir sehingga merupakan warisan dari orang tua
- b. Faktor Eksternal, adalah perilaku yang dipengaruhi oleh faktor dari luar, misalnya faktor lingkungan. Yang dimaksud faktor lingkungan adalah segenap situasi dan kondisi yang dihadapi sehari-hari oleh seseorang dalam hidupnya.

Disisi lain, Waldo (dalam Syafie 2010:52), mengemukakan bahwa “organisasi adalah sebagai suatu struktur dan kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu system administrasi”.

Sementara menurut Inu Kencana Syafiee (2010:52), “Organisasi merupakan wadah atau tempat terselenggaranya administrasi yang didalamnya terdapat hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar yang setiap anggotanya saling bekerjasama untuk melaksanakan tugas masing-masing”.

Menurut Usman Effendi (dalam Syafiee 2010:130), “Organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah suatu system mengenai aktivitas-aktivitas yang dikoordinasikan dari sekelompok orang yang bekerjasama kearah suatu tujuan bersama. Sedangkan organisasi informal adalah kumpulan hubungan antar perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan tak disadari untuk tujuan bersama”.

Menurut Hasibuan (2011:120), “Organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”.

Menurut Weber (dalam Silalahi 2011:124), “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerjasama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya”.

Menurut Waldo (dalam Silalahi 2011:124), “Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu system administrasi”.

Menurut Etzioni (dalam Silalahi 2011:125), "Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut :

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
2. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagipola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagai mana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

2.1.3.2 Unsur- unsur Organisasi

Menurut Melayu Hasibuan (2010:43) unsur- unsur organisasi yaitu:

- a. Manusia, artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerjasama, ada pimpinan dan ada yang dipimpin;
- b. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada jika ada tempat kedudukannya;

- c. Tujuan, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan organisasi yang ingin dicapai;
- d. Pekerjaan, artinya organisasi baru ada jika ada pekerjaan yang dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan;
- e. Struktur, artinya organisasi baru ada jika ada hubungan dan kerja sama antar manusia yang satu dengan yang lain
- f. Teknologi, artinya organisasi baru ada jika ada unsur teknis
- g. Lingkungan, artinya organisasi baru ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerja sama sosial.

2.1.3.3 Pengembangan Organisasi

Menurut Iskandar Wiryokusumo (2002,93) Pengembangan adalah upaya lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, teratur, dan bertanggungjawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuannya, sebagai bekal untuk selanjutnya atas prskarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesame, maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan prbadi yang mandiri.

Pengembangan organisasi inheren dengan proses perubahan dari situasi atau kondisi yang ada, yang biasanya syarat dengan masalah-masalah berupa deviasi antara kondisi yang diinginkan dan kondisi yang ada kini, melalui

perubahan-perubahan yang diperlukan menuju ke kondisi yang diinginkan. Dengan kata lain proses perubahan (the change process) dari kondisi das sein menuju kondisi das sollen.

(Warmer dan Cummings 2005:55) Pengembangan organisasi (Organization development) merupakan sebuah pendekatan komprehensif terhadap perubahan yang direncanakan, yang didesain untuk memperbaiki efektivitas organisasi secara menyeluruh. Pengembangan organisasi merupakan penerapan pengetahuan ilmu tentang perilaku (behavioral science knowledge) dalam suatu upaya jangka panjang untuk memperbaiki kemampuan sebuah organisasi dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan eksternal dan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan pemecahan masalah-masalah internalnya. Senada dengan Gordon (dalam Sagala) adalah proses yang terncana, dimanajemeni dan secara sistematis mengubah kultur, sistem, dan perilaku organisasi, guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam memecahkan masalah dan pencapaian sasaran

Helleriegel et al (1998:591) Pengembangan organisasi merupakan sebuah proses perubahan keorganisasian yang sistematik serta yang direncanakan yang berlandaskan riset ilmu dan teori tentang perilaku. Adapun tujuan dari pengembangna organisasi adalah menciptakan organisasi-organisasi adaptif yang mampu untuk berulang-ulang mentransformasi dan mereinventing diri mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan agar mereka tetap dapat bersifat efektif.

Draft dan Marcic membagi langkah pengembangan organisasi dalam tiga tahapan, yakni: (Solihin:2009:125)

1. Tahap Penyadaran (*unfreezing step*)

Pada tahap ini seluruh sumberdaya manusia yang ada di dalam suatu organisasi digugah kesadarannya akan adanya permasalahan yang membutuhkan perubahan perilaku dari sumber daya manusia organisasi.

2. Tahap Perubahan (*changing step*)

Pada tahap ini sumber daya manusia yang ada dalam organisasi melaksanakan perilaku yang baru sambil belajar memperoleh keahlian yang baru sesuai dengan tuntutan perubahan yang diinginkan organisasi.

3. Tahap Peneguhan (*refreezing step*)

Pada tahap ini nilai, sikap dan perilaku baru dievaluasi dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja masing-masing sumber daya manusia organisasi. Nilai, sikap dan perilaku memiliki kontribusi positif bagi organisasi, dilakukan peneguhan oleh organisasi melalui pemberian imbalan.

2.1.3.4 Pemberdayaan Organisasi

Pemberdayaan organisasi merupakan suatu sistem, karena memiliki berbagai komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara komponen satu dengan komponen yang lainnya untuk menciptakan suatu output. Sistem dapat dianalisis sehubungan dengan input – output. Input dianggap sebagai sebab berinteraksi guna menghasilkan output.

Komponen input terhadap suatu sistem pemberdayaan anggota organisasi, dalam hal ini aparatur pemerintah tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Komponen input ini terdiri atas (1) instrumental yang meliputi perangkat peraturan, perangkat budaya,

perangkat kebijaksanaan, norma – norma kehidupan dan sebagainya (2) environmental, baik untuk lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, yang dapat mempengaruhi sistem pemberdayaan aparatur pemerintah,(3)material, yaitu berbagai input yang bersifat bahan baku antara lain data, informasi, dan bahan – bahan lainnya yang dapat diproses untuk menciptakan pemberdayaan aparatur pemerintah, baik kepentingan organisasi maupun untuk kekuatan dirinya sendiri.

Komponen proses terhadap suatu sistem pemberdayaan anggota organisasi meliputi :

1. Kegiatan proses yang membutuhkan perangkat lunak (*software*), terutama kemampuan analisis dengan menggunakan pengetahuan, keilmuan, dan keterampilan.
2. Kegiatan proses yang membutuhkan perangkat keras (*hardware*), terutama yang berkaitan dengan tenaga fisik. Komponen proses ini diolah dari komponen input sebagai materialnya, sedangkan instrumental dan environmental hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan alat pelengkap dalam kegiatan proses pemberdayaan anggota organisasi.

Komponen output terhadap suatu sistem pemberdayaan anggota organisasi merupakan hasil dari kegiatan prooses yang meliputi : (1) output mind, antara lain pengetahuan, keilmuan maupun keterampilan yang pada dasarnya bersifat tidak nyata, dan (2) output material, antara lain barang, bangunan, konsep kebijakan dan lain sebagainya yang bersifat nyata.

Komponen outcome, dalam sistem pemberdayaan anggota organisasi adalah komponen hasil output yang melepaskan diri dari keterikatan dengan komponen lain dari sistem pemberdayaan anggota organisasi. Wujud outcome ini lebih cenderung bersifat output yang nyata.

Komponen feedback dalam sistem pemberdayaan anggota organisasi adalah komponen hasil output yang terkait dengan komponen lainnya, sehingga keberadaannya dalam suatu sistem kembali kepada input. Komponen feedback ini lebih cenderung bersifat output yang tidak nyata.

Stewart (2001:13) berargumentasi bahwa pemahaman atau pemaknaan pemberdayaan tidak dapat berjalan jika seluruh budaya organisasi tidak berubah secara mendasar. Biasanya perubahan suatu budaya yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi anggota organisasi dibagi atas empat tipe budaya, yaitu budaya kekuasaan, budaya peran, budaya tugas, dan budaya perorangan yang dapat mempengaruhi atau menentukan kualitas pemberdayaan.

2.1.3.5 Perubahan Organisasi

Perubahan selalu terjadi, disadari atau tidak. Begitu pula halnya dengan organisasi. Organisasi hanya dapat bertahan bertahan jika dapat melakukan perubahan. Menurut (Robbin, 2006:763) setiap Perubahan lingkungan yang terjadi harus dicermati karena keefektifan suatu organisasi tergantung pada sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Pada dasarnya semua perubahan yang dilakukan mengarah pada peningkatan efektifitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam

menyesuaikan diri terhadap perubahan perilaku anggota organisasi. Lebih lanjut Robbins menyatakan perubahan organisasi dapat dilakukan pada struktur yang mencakup strategi dan sistem, teknologi, penataan fisik dan sumber daya manusia.

Sobirin (2005:2) menyatakan ada 2 faktor yang men dorong tejadinya perubahan, yaitu Faktor ekstern seperti perubahan, dan semakin terintegrasinya ekonomi internasional serta faktor intern organisasi yang mencakup dua hal pokok yaitu (1) perubahan perangkat keras organisasi (*hard system tools*) atau yang biasa disebut dengan perubahan struktural, yang meliputi perubahan strategi, struktur organisasi dan sistem serta (2) Perubahan perangkat lunak organisasi (*soft system tools*) atau perubahan kultural yang meliputi perubahan perilaku manusia dalam organisasi, kebijakan sumber daya manusia dan Budaya organisasi.

Faktor-faktor adanya perubahan:

Menurut Robbins (2006:764) ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa suatu organisasi perubahan diterangkan dalam bukunya bahwa perubahan organisasi memiliki alasan dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Persaingan, Dalam hal ini pesaing-pesaing organisasi dapat datang dari arah mana saja dan dalam bentuk apapun. Tingkat persaingan yang tinggi memaksa suatu organisasi harus bisa bertahan. Adapun organisasi yang dapat bertahan dalam persaingan ini adalah organisasi yang dapat berubah dan menanggapi (menjawab) tantangan-tantangan yang dihadapinya.
- b. Kejutan Ekonomi, Kondisi Perekonomian yang berubah-ubah dan tidak dapat diprediksikan seperti yang terjadi dewasa ini sewaktu-waktu akan dapat mengejutkan dunia usaha.

- c. Teknologi, merupakan hal yang harus selalu diikuti oleh organisasi dalam rangka mengatasi persaingan. Perubahan teknologi harus dapat dijawab oleh organisasi untuk dapat mensejajarkan diri dalam persaingan.
- d. Tren Sosial, perubahan keadaan sosial suatu tempat akan berimbas pada budaya masyarakat. Hal ini akan terus berlansung perkembangan zaman.
- e. Politik, Suatu organisasi harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan politik dimana organisasi itu berada. Dengan demikian, Terhadap perubahan politik ini memaksa organisasi untuk berubah.

2.1.4 Teori/Konsep Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut di muka pengadilan.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 menunjuk tiga pola otonomi, yaitu: otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, dan desa sebagai otonomi asli. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan pemerintah kabupaten mengupayakan sebagai berikut:

Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada di dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi pelestarian, konservasi dan pembangunan berkelanjutan

Kedua, memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.Ketiga, memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari definisi tersebut, sebenarnya desa merupakan bagian yang penting bagi keberadaan bangsa Indonesia. Penting karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa ditawar dan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu unsur-unsur desa. Menurut Budi Santosa (2003:13), unsur-unsur tersebut ialah:

1. Daerah, dalam artian tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis tempat.

2. Penduduk, adalah hal yang memiliki jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pemcaharian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa atau *tutalsociety*.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan massyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukanlah merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa menurut Haw Widjaja (2003:51) adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.1.5 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Secarayuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.1.5.1 Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

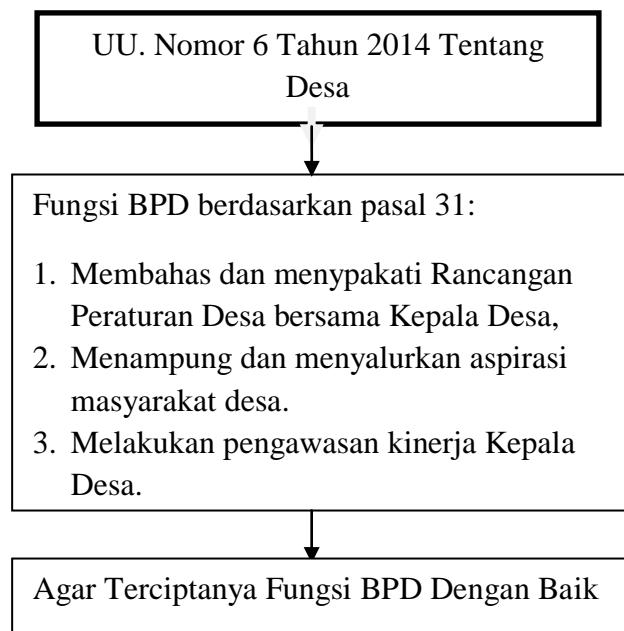
Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten /kota bersama Bupati/Walikota.Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas

2.2 Kerangka Pikir

Gambar: 2.1 Kerangkapemikiran



2.3 Hipotesis Kerja

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh kerena itu, rumusan masalah penelitian biasanya ditulis dalam bentuk pertanyaan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru

berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris melalui pengumpulan data.

Berdasarkan dari perumusan masalah penulis maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut: diduga sementara bahwa Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Talontam Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi belum Tercipta dengan baik.

2.4 Konsep Operasional

Untuk menganalisis fungsi BPD sesuai dengan Fungsi BPD Dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan berfungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, yaitu merumuskan peraturan desa, membuat peraturan desa bersama pemerintah desa dan menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.
2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu menerima masukan atau saran dari masyarakat, mencatat semua aspirasi masyarakat, melakukan rapat koordinasi dengan perangkat desa dan melaksanakan kepentingan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan dalam meyelenggarakan pembangunan desa. Dan menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yaitu melakukan Pengawasan terhadap seluruh pekerjaan Kepala desa dan mengawasi setiap kinerja yang sudah dicapai kepala desa.

2.5 Operational Variabel

Tabel 2.1 Operational Veriabel

Variabel	Indikator	Item Penilaian
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana Kinerja Anggota BPD dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa?
	2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah Fungsi BPD dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa tercipta dengan baik?
	2. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana cara anggota BPD Melakukan pengawasan kinerja KepalaDesa?

Data Olahan 2020

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2007: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam tentang data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok,masyarakat, atau organisasi tertentu.Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat maupun organisasi tertntu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh. Subjek yang diteliti dalam hal ini adalah Badan permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam Benai dan Objek penelitiannya adalah masyarakat desa Talontam Benai yang menjadi pemanfaat dari Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di desa Talontam Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan

Menurut Hendarsono (dalam Suyanto 2015:171) informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Menentukan informan yang ada, digunakan teknik. Yaitu teknik “*Purposive Sampling*” . *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan informan secara subjektif dengan maksud, tujuan dan pertimbangan tertentu, yang mana

menganggap bahwa informan yang dijadikan sampel tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan atau diperlukan dalam penelitian nantinya.

Tabel: 3.1 Tabel Informan

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Desa	1	5%
2	BPD	7	35%
3	Masyarakat	12	60%
Jumlah		20	100%

Sumber Kantor Kepala Desa Talontam Benai Siberakun 2020

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penilitian menggunakan sumber data, yaitu:

3.3.1 Data Primer

Menurut M. Iqbal Hasan (2002:82) Data Primer adalah data yang diperolah atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yang memerlukannya. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data- data terkait tentang Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di desa Talontam Benai yang akan didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut M. Iqbal Hasan (2002:82) data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, yang dapat diperoleh dari perpustakaan, seperti buku, majalah, jurnal, atau literatur lain yang berguna bagi penelitian ini.. Data sekunder juga disebut data tersedia.

3.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkkan jalannya suatu penelitian. Adapun batasan peneliti yang menjadi fokus pada peneliti ini seperti yang dijelaskan dalam kerangka berpikir penelitian, yaitu dengan menjelaskan Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan beberapa Indikator.

3.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun peneliti memilih lokasi di Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi karena lokasi tersebut memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bergerak aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan mengatasi perekonomian masyarakat serta meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat Desa

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

3.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpulan data (perwawancara) dengan sumber data (responden).

Menurut (Ahmadi, 2014:119) Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara penilitian dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. Wawancara dapat dilakukan secara formal dan informal (terjadwal dan tidak terjadwal) di tempat resmi dan di tempat umum atau tidak resmi .

3.6.2 Observasi

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2009:145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses- proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala- gejala alam dan apabila responden tidak terlalu besar.

Adapun yang diamati dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengelolaan program pembangunan untuk kebutuhan masyarakat Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2007:240) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya momental dari seseorang. Sedangkan menurut G.J Renier (dalam Sugiyono 2007:240) menjelaskan istilah dokumentasi dalam tiga pengertian, pertama dalam arti luas yaitu yang meliputi semua sumber, baik tertulis maupun lisan; kedua dalam arti sempit yaitu meliputi semua sumber data tertulis saja; ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya meliputi surat- surat konsensi, hibah dan

sebagainya.Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: Data Profil Desa Talontam Benai, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam Benai, dan lain sebagainya.

3.7 Teknik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:91), Kegiatan analisis terdiri tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
2. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberkemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan verifikasi.

Merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, makna-makna yang muncul dari data harus dapat diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis yang peneliti lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan dan dalam fokus penelitian ini.\

4. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2012:330) Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

3.8. Waktu Penelitian

Tabel 3.2 Rancangan Kegiatan Penelitian

BAB IV

GAMBARAN DAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Desa Talontam berdiri sejak tahun 1960, pada awalnya Desa Talontam merupakan bagian wilayah Kenegerian Benai. Demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat maka Kenegerian Benai dimekarkan menjadi lima desa yaitu Desa Koto Benai, Talontam Benai, Banjar Benai, Pasar Benai dan Benai Kecil.

Tabel 4.1:Tabel jumlah Desa Di Kenegrian Benai

No	Nama Desa	Populasi
1	Koto Benai	528
2	Benai Kecil	531
3	Talontam Benai	1241
4	Banjar Benai	3215
5	Pasar Benai	1387
Jumlah		6884

Sumber Kantor kepala desa Pulau Talontam Benai 2020

Paska pemekaran dan pemisahan diri dari Kenegerian Benai maka dibentuk sistem pemerintahan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sejarah Kepemimpinan Desa

KEPALA DESA

- | | |
|-------------|---------------------|
| 1. Sadurdin | Tahun 1960 s/d 1986 |
| 2. Mudarus | Tahun 1986 s/d 2000 |

3. Rais Pidin Tahun 2000 s/d 2006
4. Rajinan Tahun 2006 s/d 2012
5. Drs. H. Marta Saleh Tahun 2012 s/d 2018
6. R.Helpi Alponso Tahun 2018 s/d sekarang

SEKRETARIS DESA

1. Mudarus Tahun 1960 s/d 1986
2. Irianto Tahun 1986 s/d 2000
3. Rajinan Tahun 2000 S/D 2006
4. Firdaus Tahun 2006 s/d 2012
5. Erles, S.Hum Tahun 2012 s/d 2018
6. Erles, S.Hum Tahun 2018 s/d sekarang

4.2 Keadaan Geografis

Desa Talontam memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar, serta daerah administratif Desa Talontam jika melihat ke Desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Benai adalah menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif sedang. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Talontam maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Talontam pada masa ke masa.

Tabel 4.2:Tabel jumlah Desa Di Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Nama Desa	Populasi
1	Koto Benai	528
2	Benai Kecil	531
3	Talontam Benai	875
4	Banjar Benai	3215
5	Pasar Benai	1387
6	Gunung Kesiangan Siberakun	581
7	Banjar Lopak Siberakun	604
8	Pulau Kalimanting Siberakun	418
9	Pulau Tongah Siberakun	578
10	Ujung Tanjung Siberakun	344
11	Pulau Bungin Siberakun	920
12	Tanjung Simandolak	442
13	Koto Simandolak	1407
14	Pulau Ingu Simandolak	1281
15	Pulau Lancang Simandolak	521
16	Tebing Tinggi Simandolak	1488
Jumlah		15486

Sumber Kantor Camat Benai 2020

Secara geografis Desa Talontam merupakan salah satu Desa di Kecamatan Benai yang mempunyai luas wilayah mencapai 6.000.000 M2. Dengan jumlah penduduk Desa Talontam sebanyak 1241 Jiwa. Desa Talontam merupakan salah satu Desa dari 15 (Lima Belas) Desa dan 1 (Satu) Kelurahan yang ada di kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Desa Talontam berada pada ketinggian \pm 165 dpl (longitut 6,80244 °E dan etitut 106,70534 °E) dan curah hujan \pm 254 mm, rata-rata suhu udara 28° - 32° celcius. Bentuk wilayah Desa Talontam adalah persegi, terletak di sebelah Utara Kecamatan Benai yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama \pm 5 menit dari Ibukota Kecamatan dan 20 menit dari Ibu Kota Kabupaten. Adapun batas-batas Desa Talontam Benai Kecamatan Benai adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Benai.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banjar Benai
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Munsalo Kopah.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Koto Benai

4.3 Keadaan Penduduk

4.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pulau Talontam Benai tahun 2020 adalah berjumlah 1241 jiwa, yang tersebar di 3 dusun (dusun pelayangan, dusun komang, dusun rimbo godang).

Tabel 4.3: Data Penduduk Desa Talontam Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi.

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Warga		
			Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pelayangan	113	233	221	454
2	Komang	94	188	195	383
3	Rimbo Godang	103	207	197	398
Jumlah		310	628	613	1241

Sumber Kantor Kepala Desa Talontam Benai 2020

4.3.2 Tingkat Pendidikan Penduduk

Pendidikan penduduk di Desa Talontam Benai terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Adapun rata-rata pendidikan terakhir di Desa Talontam Benai ini adalah tamatan SMA.

Tabel 4.4: Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Talontam Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	216
2	SD Sederajat	337
3	SMP Sederajat	320
4	SMA Sederajat	313
5	D1/D2	18
6	D3	15
7	SI	20
8	S2	2
Jumlah		1241

Sumber Kantor Kepala Desa Talontam Benai 2020

4.3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk desa Talontam Benai berdasarkan KK pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, Buruh Tani, Buruh/Swasta, PNS, Pertukangan, Pedagang, Pengemudi/Data, Pensiunan, PNS, TNI/POLRI, Industri Kecil, dan lainnya. Dari data ini kita dapat melihat banyak masyarakat di Desa Talontam Benai yang bekerja sebagai Petani. Dibawah ini dapat dilihat secara terperinci jumlah penduduk menurut mata pencaharian.

Tabel 4.5:Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Talontam Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	580
2	Buruh Tani	46
3	Pertukangan	33
4	Pedagang	76
5	Pengemudi/Jasa	21
6	PNS	118
7	TNI/POLRI	3
8	Pensiunan	8
9	Industri Kecil	5
10	Buruh Industri	20
Jumlah		910

Sumber Kantor Kepala Desa Talontam Benai 2020

4.3.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tabel 4.6: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi

No	Umur	Jumlah
1	0-5 Tahun	156
2	6-18 Tahun	286
3	19-59 Tahun	695
4	60 Tahun Keatas	104
Jumlah		1241

Sumber Kantor Kepala Desa Talontam Benai 2020

4.3.5 Sarana Pendidikan

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Talontam Benai Kecamata Benai Kabupaten Kuantan Singgingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7: Sarana Pendidikan di Desa Talontam Benai Kecamata Benai Kabupaten Kuantan Singgingi

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak- kanak (TK)	1
2	Sekolah Dasar (SD)	3
3	MDA	1
4	SMP	1
Jumlah		6

Sumber : Kantor Kepala Desa Talontam Benai 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sarana pendidikan di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi berjumlah 6 sarana pendidikan yang terdiri dari 1 bangunan TK, 3 bangunan SD, 1 bangunan MTs dan 1 bangunan SMP

4.4 Agama

Adapun agama yang dianut di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8:Agama yang di anut di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1241
2	Kristen	0
3	Budha	0
4	Hindu	0
5	Kong hu chu	0
Jumlah		1241

Sumber: Kantor Kepala Desa Talontam Benai 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Agama islam Merupakan satu-satunya agama yang dianut di Desa Talontam Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun sarana Ibadah yang di Desa Talontam Benai ada beberapa sarana peribadatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

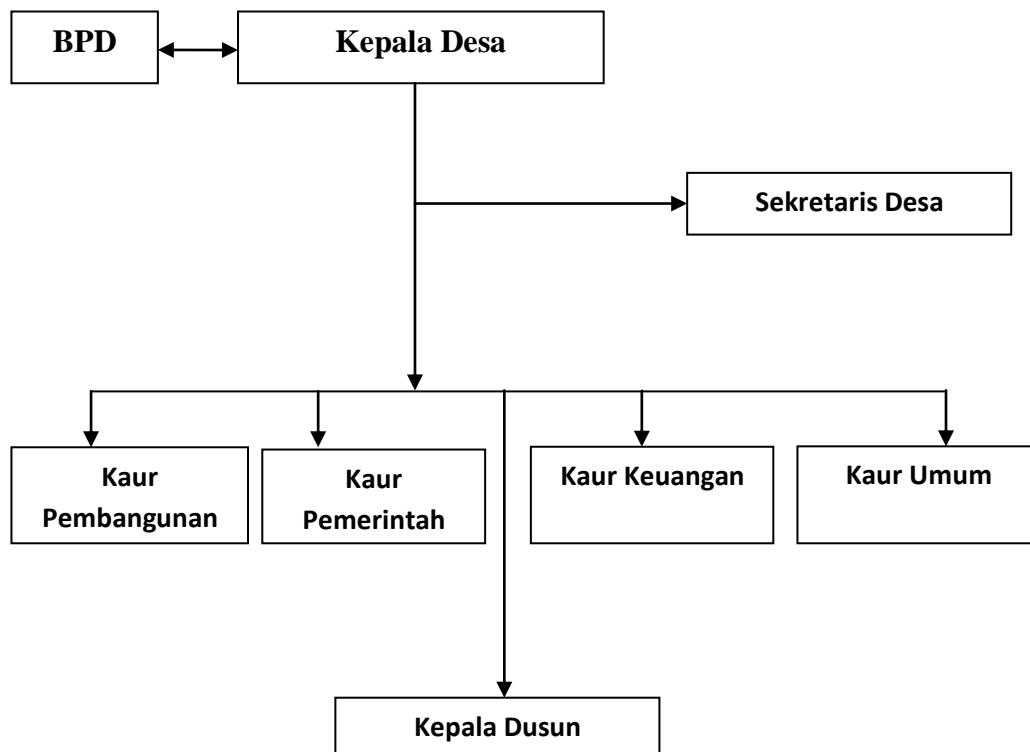
Tabel 4.9: Sarana Peibadatan di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

NO	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushallah/Surau	4
3	Gereja	0
4	Kuil	0
5	Pura	0
Jumlah		6

Sumber: Kantor Kepala Desa Talontam Benai 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sarana peribadatan yang ada di Desa Talontam Benai Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yakni 6 sarana peribadatan, yang terdiri dari 2 bangunan masjid dan 4 bangunan mushallah/surau.

Gambar 4.1:Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Kantor Desa Talontam Benai 2020

Adapun tugas dan fungsi masing- masing pemerintahan Desa Talontam Benai adalah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 pada pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa:

1. Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kemudian menurut pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 menjelaskan pula bahwa, kepala desa mempunyai fungsi:

- a. Menggerakkan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan desa;
- b. Mengeerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- d. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Sekretaris Desa

Sedangkan pada pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singgingi Nomor 2 Tahun 2009 menjelaskan Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana, pengendalian,pelaporan, dan evaluasi penyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi pemerintahanm, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan tugas ddan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- rundangan yang berlaku.

3. Kepala Urusan

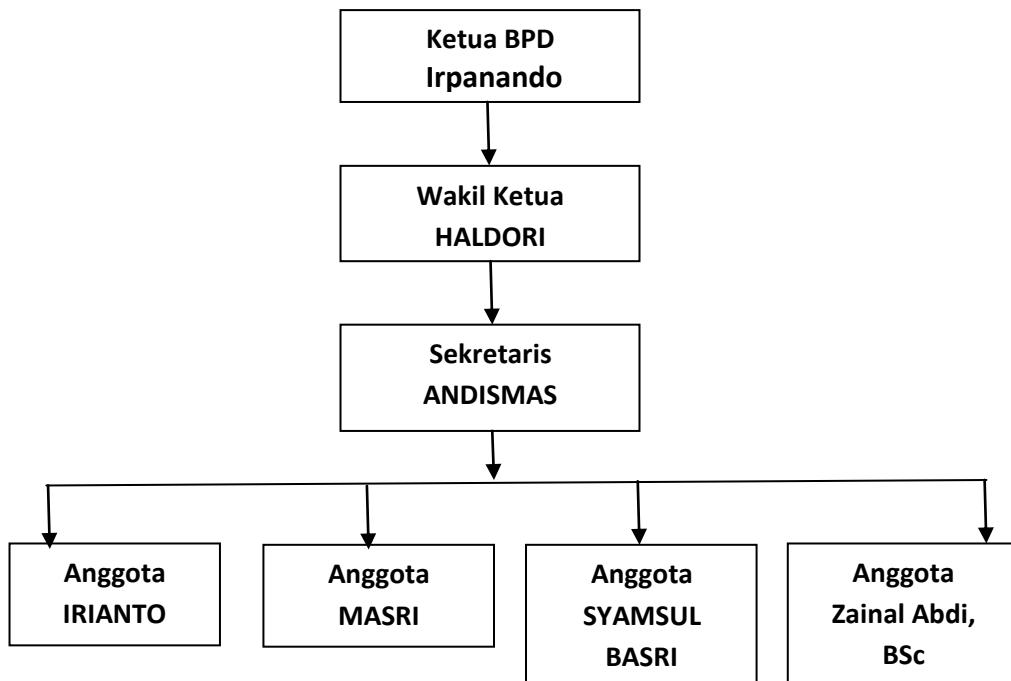
Kemudian menurut pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 dijelaskan pula Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. Dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

4. Kepala Dusun

Selanjutnya pada pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 menjelaskan tugas dari kepala dusun adalah:

- a. Melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan keputusan atau kebijaksanaan kepala desa;
- c. Membina dan meningkatkan swadaya atau peran serta masyarakat dan budaya kegotong royongan;
- d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah diwilayah kerjanya;
- e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan kepala desa;
- f. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dusun bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

Gambar 4.2: Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi



Sumber Kantor Kepala Desa Talontam Benai 2020

5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Secara hukum, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut

13. Menggali aspirasi masyarakat
14. Menampung aspirasi masyarakat
15. Mengelola aspirasi masyarakat
16. Menyalurkan aspirasi masyarakat
17. Menyelenggarakan musyawarah BPD
18. Menyelenggarakan musyawarah Desa
19. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
20. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
21. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
22. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
23. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

24. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten /kota bersama Bupati/Walikota. Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1. Identitas Informan Penelitian

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 20 informan, yaitu Kepala Desa, BPD, dan Masyarakat,.

5.1.1 Informan Menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas informan pemerintahan desa dan masyarakat terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki- laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin informan yang ada pada pemerintahan desa dan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Karakteristik Informan di Lihat dari Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki- laki	14	70 %
2	Perempuan	6	30 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan 2020

Tabel diatas dapat dilihat bahwa informan untuk Penelitian fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak didominasi oleh laki- laki yaitu sebanyak 14 orang dengan Persentase 70 % sedangkan perempuan hanya sebanyak 6 orang dengan Persentase 30%.

5.1.2 Informan Menurut Kelompok Umur

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa saja yang tidak dan harus dilakukan. Disamping itu tidak dipungkiri juga bahwa usia juga mempengaruhi fisik seseorang dalam

melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tua usia seseorang maka kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan usianya yang lebih muda.

Berikut ini akan dikelompokkan jumlah responden pemerintah dan masyarakat desa Pulau Talontam benai yang dikelompokkan berdasarkan umur yang telah peneliti kelompokkan dalam 3 kategori yaitu umur 20-30 Tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan 51- 60 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 2 Karakteristik Informan menurut Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20-30	2	10%
2	31-40	7	35 %
3	41-50	8	40%
4	51-60	3	15 %
Jumlah		20	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa usia informan yang ada di desa Talontam Benai berkisar antara umur 20-30 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 10%, umur 31-40 tahun berjumlah Tujuh orang dengan persentase 35%, umur 41- 50 tahun berjumlah Delapan orang dengan persentase 45% dan umur 51- 60 tahun berjumlah tiga orang dengan persentase 15%.

5.1.3 Informan Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian atau sikap agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan serta merupakan usaha

untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan akan membuat matang pola pikirnya dalam berbuat dan bertingkah laku serta dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai tingkat pendidikan pemerintahan Desa dan Masyarakat desa Talontam Benai maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3 Karakteristik Informan menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	0	0 %
2	SMP Sederajat	7	35 %
3	SMA Sederajat	10	50 %
4	Diploma	0	0 %
5	Sarjana	3	15 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan informan yang ada di desa Pulau Bungin Siberakun terdiri dari tamat SMP berjumlah Tujuh orang dengan persentase 35%, Tamat SMA berjumlah Sepuluh orang dengan persentase 50%, dan Sarjana berjumlah Tiga orang dengan persentase 15%.

5.1.4 Informan Menurut Status Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai status pekerjaan pemerintahan dan masyarakat Desa Talontam Benai maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4: Karakteristik Informan menurut status pekerjaan

No	Status Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Desa	1	5%
2	PNS	3	15%
3	Wiraswasta	6	30%
4	Petani	10	50%
Jumlah		20	100%

Sumber Data olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa status pekerjaan informan yang ada di desa Talontam Benai terdiri dari Kepala desa berjumlah Satu orang dengan persentase 5%, PNS berjumlah Tiga orang dengan persentase 15%, Wiraswasta berjumlah Enam orang dengan persentase 30%, dan Petani berjumlah sepuluh orang dengan persentase 50%.

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan UU. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 31 mengemukakan tentang fungsi BPD yang mana terdapat ada 3 fungsi. Ke Tiga fungsi tersebut adalah Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang mana peneliti menjadikan ketiga fungsi ini sebagai Kerangka Pemikiran yang dijadikan acuan dalam penelitian Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka dari itu akan dipaparkan hasil penelitian yang akan menjelaskan Analisis Fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi, dilihat dari penjelasan hasil penelitian tiap- tiap Indikator dibawah ini.

5.2.1 Indikator Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, yaitu merumuskan peraturan desa, membuat peraturan desa bersama pemerintah desa dan menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Pada Indikator ini diambil item penelitian sebanyak dua item yang dijadikan landasan pertanyaan pertama ” Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Kinerja Anggota BPD dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa?”

Menurut Informan dari masyarakat desa Talontam Benai yang mengatakan bahwa:

Dari yang saya lihat kinerja anggota BPD kurang efektif karena beberapa dari anggota nya tidak terlalu aktif dalam bekerja, jadi menurut saya kinerja mereka tidak terlalu bagus untuk saat ini.

(Wawancara,28 Agustus 2020)

Tanggapan yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh informan yang berasal dari masyarakat desa Talontam Benai yang mengatakan bahwa:

Saya tidak terlalu mengetahui bagaimana kinerja BPD dalam membahas peraturan desa tetapi dari yang saya ketahui anggota BPD kurang efektif dalam mengerjakan fungsi nya tersebut, karena mereka tidak mengajukan ide apapun.

(Wawancara, 28 Agustus 2020)

Dari wawancara dengan masyarakat diatas kesimpulan yang saya ambil yaitu Kinerja Anggota BPD dalam membahas rancangan tentang peraturan desaTidak efektif kerena menurut mereka anggota Bpd bekerja tidak terlalu aktif sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya fungsi BPD satu ini. BPD tidak Juga

Mengajukan Ide-ide yang cemerlang untuk kepentingan masyarakat, padahal jika mereka mengajukan nya maka akan baik bagi Masyarakat.

Kemudain menurut informan yang Kepala Desa di desa Talontam Benai yang mengatakan bahwa:

Menurut saya anggota BPD untuk saat ini memang belum efektif kinerjanya, saya berharap untuk kedepannya anggota BPD bisa lebih giat dan lebih serius jika sedang dalam bekerja, dan saya berharap kita bisa bekerja sama dalam membangun desa.

(Wawancara, 29 Agustus 2020)

Menurut informanyang berasal dari Masyarakat desa Talontam Benai yang mengatakan bahwa:

Menurut saya anggota BPD tidak peduli dengan fungsinya tersebut karena mereka tidak pernah hadir dalam mendiskusikan pembahasan tentang perencanaan desa ini, malah terkesan malas-malasan dalam bekerja..

(Wawancara,28 Agustus 2020)

Dari wawancara dengan masyarakat dan kepala desa diatas kesimpulannya mereka juga menganggap para anggota BPD belum melaksanakan fungsinya yaitu membahas rancangan desa dengan baik, karena terkesan anggota malam dalam bekerja bahkan tidak hadir jika ada pembahasan tentang itu.

Selanjutnya menurut informan yang berasal dari BPD yang mengatakan bahwa:

Menurut saya kami berusaha untuk ikut andil dalam pembahasan rancangan peraturan desa tersebut, apakah efektif atau tidaknya mungkin memang belum seratus persen, tetapi berusaha untuk bekerja dengan baik .

(Wawancara, 29 Agustus 2020)

Selanjutnya menurut informan yang berasal dari Anggota BPD Yang mengatakan bahwa:

Menurut saya kinerja kami memang belum efektif tetapi kami sudah berusaha melaksanakannya dengan baik supaya fungsi dari kami ini bisa berjalan dengan baik dan bisa mensejahterakan masyarakat
(Wawancara, 29 Agustus 2020)

Dari wawancara saya dengan Anggota BPD diatas kesimpulan yang saya ambil adalah memang kinerja mereka dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa memang belum maksimal karena masih ada dari beberapa anggota BPD yang tidak menunaikan fungsinya ini dengan dan tidak sadar akan hal itu.

Kemudian dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dan Anggota BPD yang peneliti jadikan informan memberikan tanggapan atau intisari dari jawaban yang hampir sama satu sama lain yaitu mengatakan bahwa Kinerja BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan desa bersama kepala desa belum tetlaksana dengan baik dikarenakan banyak dari anggota BPD yang tidak efetif dalam bekerja mereka tidak memberikan ide-ide yang cemerlang untuk pembanguna di desa ini.

Kemudian untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan “ Menurut Bapak/Ibu apakah anggota BPD sudah mengajukan peraturan desa yang baik?”

Menurut informan yang berasal dari masyarakat desa Talontam Benai yang mengatakan bahwa:

Dari yang saya lihat anggota BPD belum bisa megajukan peraturan desa yang baik karena mereka tidak kompeten dalam bekerja, mereka tidak bisa dan mampu membuat peraturan desa yang baik
(Wawancara, 28 Agustus 2020)

Sama dengan pertanyaan informan diatas, informan dari masyarakat desa Talontam Benai yang mengatakan bahwa:

Menurut saya mereka belum pernah mengajukan peraturan desa yang baik, karena mereka jarang mengikuti rapat desa yang membahas tentang peraturan desa mereka tidak konsisten dalam bekerja.

(Wawancara, 28 Agustus 2020)

Dari wawancara dengan masyarakat diatas menurut mereka anggota BPD belum pernah dan belum bisa mengajukan peraturan desa yang baik, karena anggota BPD dinilai tidak kompeten dalam bekerja dan sering tidak menghadiri rapat desa sehingga mereka tidak bisa mengajukan peraturan desa yang baik. Anggota BPD dinilai juga tidak efektif dan tidak mampu dalam bekerja.

Selanjutnya informan dari Kepala desa Talontam Benai yang mengatakan bahwa:

Saya rasa anggota BPD memang kurang maksimal dalam bekerja tetapi, bukan tidak pernah mereka mengajukan peraturan desa, mereka pernah ikut andil tapi memang kinerja mereka perlu ditingkatkan perlu tekad yang kuat dalam bekerja.

(Wawancara, 29 Agustus 2020)

Sama dengan pertanyaan informan diatas, informan yang berasal dari masyarakat desa Talontam Benai yang mengatakan bahwa:

Saya sebagai masyarakat kurang mengetahui sepenuhnya apakah anggota BPD sudah mengajukan peraturan desa yang baik atau Belum, tapi saya sangat berharap anggota BPD bisa mengajukan peraturan Desa yang baik, sehingga bisa menghasilkan peraturan desa yang baik..

(Wawancara, 28 Agustus 2020)

Menurut wawancara saya dengan Kepala desa dan masyarakat diatas kesimpulannya menurut mereka anggota BPD bukan tidak pernah ikut andil dalam membuat peraturan desa, mereka pernah ikut andil tapi kinerja mereka yang kurang maksimal dan perlu ditingkatkan dan masyarakat sangat berharap anggota BPD bisa bekerja dengan baik supaya bisa menghasilkan peraturan desa yang baik.

Sama dengan pertanyaan informan diatas, informan yang berasal dari anggota BPD mengatakan bahwa:

Kami sebagai anggota BPD sudah berusaha ikut serta dalam menjalankan peraturan desa, yaitu ikut membahas dan menyepakati peraturan desa, tetapi memang pelaksana nya yang belum maksimal.

(Wawancara, 29 Aguatus 2020)

Selanjutnya Tanggapan dari informan yang berasal dari anggota BPD yang mengatakan bahwa:

Menurut yang saya kami sudah mengajukan beberapa peraturan desa, dan kami juga akan berusaha untuk mengajukan lagi nanti peraturan desa yang baik,kalau masalah efektif atau tidaknya memang beberapa anggota belum bekerja dengan maksimal .

(Wawancara, 25 Maret 2019)

Menurut wawancara saya dengan Anggota BPD menurutnya mereka sudah berusaha mengajukan peraturan desa yang baik, tetapi menurut mereka maemang masih ada dari beberapa anggota yang belum bekerja secara maksimal, sehingga beberapa peraturan desa belum terlaksana.

Kesimpulan dari Indikator Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa melalui wawancara dan observasi yang saya lakukan adalah Kinerja Anggota BPD dalam membahas rancangan tentang peraturan desaTidak efektif kerena menurut mereka anggota Bpd bekerja tidak terlalu aktif sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya fungsi BPD satu ini. BPD tidak Juga Mengajukan Ide-ide yang cemerlang untuk kepentingan masyarakat, padahal jika mereka mengajukan nya maka akan baik bagi Masyarakat. Dan juga anggota BPD belum pernah dan belum bisa mengajukan peraturan desa yang baik, karena anggota BPD dinilai tidak kompeten dalam bekerja dan sering tidak menghadiri rapat desa sehingga mereka tidak bisa mengajukan peraturan desa

yang baik. Anggota BPD dinilai juga tidak efektif dan tidak mampu dalam bekerja. Menurut peneliti anggota BPD memang belum melaksanakan fungsinya membahas dan menyepakati perturan desa dengan baik, masih ada beberapa anggota BPD yang belum efektif dalam bekerja dan tidak kompeten dalam bekerja.

5.2.3 Indikator Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat

Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu menerima masukan atau saran dari masyarakat, mencatat semua aspirasi masyarakat, melakukan rapat koordinasi dengan perangkat desa dan melaksanakan kepentingan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan dalam meyelenggarakan pembangunan desa. Dan menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat. Pada tipe ini diambilah item penilaian sebanyak dua item yang dijadikan landasan pertanyaan pada wawancara terhadap masing-masing informan, dengan pertanyaan yang pertama “ Menurut Bapak/Ibu Apakah Fungsi BPD dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa tercipta dengan baik?”

Menurut informan yang berasal dari masyarakat Desa Talontam Benai mengatakan bahwa:

Menurut saya fungsi mereka dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak tercipta dengan baik karna buktinya sampai saat ini belum ada aspirasi masyarakat yang tersalurkan dan belum ada yang terselesaikan.
 (Wawancara 28 Agustus 2020)

Selanjutnya informan dari Masyarakat Talontam Benai yang mengatakan bahwa:

BPD dalam hal ini menurut saya belum cukup aktif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, karna buktinya hampir semua aspirasi masyarakat belum tertampung dengan baik oleh BPD. Dalam hal ini sangat diperlukan peningkatan oleh pemerintah desa dan fungsi BPD sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
(Wawancara, 28 Agustus 2020)

Dari wawancara peneliti dengan masyarakat diatas menurut mereka Anggota BPD belum bekerja cukup aktif dalam memapung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan belum tersedianya wadah untuk masyarakat menyalurkan aspirasinya. Anggota BPD juga tidak berusaha menyaring papun aspirasi masyarakat.

Sama dengan pertanyaan informan diatas, informan dari anggota BPD yang mengatakan bahwa:

Sejauh ini penyaluran aspirasi masyarakat memang belum semua nya kami salurkan itu semua perlu waktu untuk melaksanakannya. Tapi untuk kedapannya kami pasti akan memilih dengan teliti apasaja aspirasi masyarakat yang akan kami salurkan..

(Wawancara, 29 Agustus 2020)

Sama dengan pertanyaan informan diatas, informan yang berasal dari Anggota BPD yang mengatakan bahwa:

Aspirasi maupun opini masyarakat memang tidak bisa di hindari karena memang selagi hidup maka seseorang akan selalu berada ruang befitik. Sejauh saya sebagai anggota BPD bahwa aspirasi masyarakat itu cukup banyak dari semuanya itu kita filter sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
(Wawancara, 29 Agustus 2020)

Dari wawancara peneliti dengan Anggota BPD diatas tanggapan yang mereka berikan yaitu menurut mereka aspirasi masyarakat itu cukup banyak dan para anggota BPD perlu waktu untuk menyaring dan memilih aspirasi mana yang harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya informan dari masyarakat desa Talontam benai yang mengatakan bahwa:

Menurut saya BPD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat sangat lamban, hampir semua aspirasi yang masuk yang tidak di tindaklanjuti dengan cepat sehingga aspirasi masyarakat tidak ada yang disalurkan.
(Wawancara, 28 Agustus 2020)

Informan dari Masyarakat desa Talontam Benai yang mengatakan bahwa :

Sampai saat ini belum ada aspirasi masyarakat yang tersalurkan,dari yang saya lihat BPD tidak cukup antusian dalam menjalankan fungsinya ini sehingga banyak dari aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan
(Wawancara, 28 Agustus 2020)

Dari wawancara peneliti dengan Mayarakat diatas menurut mereka BPD di nilai lamban dalam menidaklanjuti aspirasi masyarakat, sehingga tidak ada aspirasi masyarakat yang terlaksana dengan baik, dan anggota BPD dinilai juga tidak cukup antusias dalam melaksanakan fungsinya ini.

Peneliti melihat jawaban yang diberikan masing- masing informan 1 sampai 20 terdiri dari masyarakat dan perangkat desa jawabannya berbeda-beda yaitu menurut masyarakat Anggota BPD belum bekerja cukup aktif dalam memapung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan belum tersedianya wadah untuk masyarakat menyalurkan aspirasinya. Anggota BPD juga tidak berusaha menyaring apapun aspirasi masyarakat, sedangkan menurut BPD sendiri menurut mereka aspirasi masyarakat itu cukup banyak dan para anggota BPD perlu waktu untuk menyaring dan memilih aspirasi mana yang harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu peneliti melaksanakan Observasi, dan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa memang BPD belum menampung dan menyalurkan aspirasi dengan baik.

Kemudian untuk penilaian item kedua dengan pertanyaan “ Menurut Bapak/Ibu Apakah Anggota BPD pernah turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat?”

Menurut informan yang berasal dari masyarakat desa Talontam Benai yang mengatakan bahwa:

Anggota BPD tidak turun lapangan sejauh ini untuk menyerap aspirasi masyarakat, bahkan mereka tidak pernah mensosialisakan apapun kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui bagaimana cara menyampaikan aspirasinya .

(Wawancara, 28 Agustus 2020)

Sama dengan pertanyaan informan diatas, informan dari Masyarakat desa Talontam Benai mengatakan bahwa:

Kalau menurut saya mereka tidak pernah turun lapangan dan tidak pernah menyiapkan wadah apapun untuk tempat masyarakat menyalurkan aspirasi masyarakat.Kami sebagai masyarakat berharap BPD akan menyiapkan wadah untuk tempat menyalurkan aspirasi masyarakat.

(Wawancara, 28 Agustus 2020)

Dari wawancara diatas dapat diambil BPD belum pernah turun lapangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan juga tidak pernah menyiapkan wadah apapun unruk tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya, sehingga masyarakat merasa BPD tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi dengan baik.

Selanjutnya menurut Informan yang berasal dari anggota BPD yang mengatakan bahwa:

Sejauh ini kami memang belum pernah turun lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi kami berusaha untuk mendengarkan apasaja aspirasi yang diinginkan masyarakat.

(Wawancara, 29 Agustus 2020)

Selanjutnya menurut Informan yang berasal dari BPD yang mengatakan bahwa:

Menurut saya kami tidak perlu turun lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat, cukup dengan mendengarnya dalam rapat desa, dengan hal tersebut kami juga bisa menyerap aspirasi masyarakat
(Wawancara 29 Agustus 2020)

Dari wawancara dengan BPD diatas dapat di ambil kesimpulan menurut mereka belum turun lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan menurut mereka tidak perlu untuk turun lapangan untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat karena menurut mereka hal itu bisa dilakukan dengan rapat desa, hal tersebut sudah bisa menyerap aspirasi menurut BPD.

Selanjutnya menurut Informan yang berasal dari Kepala desa pulau Bungin Talontam Benai yang mengatakan bahwa:

Menurut saya sejauh ini mereka belum pernah turun lapangan, menurut saya memang sebaiknya para anggota BPD turun lapangan supaya bisa lebih maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat.
(Wawancara 29 Agustus 2020)

Tanggapan selanjutnya datang dari Masyarakat Desa Talontam Benai yang mengatakan bahwa:

Sejauh ini belum ada dari anggota BPD yang turun lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat, saya sangat mengharapak bila BPD bisa turun lapangan untuk bisa menyerap apapun aspirasi masyarakat.
(Wawancara 28 Agustus 2020)

Dari wawancara diatas dengan Kepala desa dan masyarakat diatas kesimpulannya BPD belum pernah turun lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi masyarakat dan kepala desa sangat mengharapakan BPD untuk bisa turun lapangan nanti lebih maksimal menyerap aspirasi masyarakat.

Dilihat dari hasil wawancara dengan BPD dan masyarakat bahwa apakah BPD pernah turun lapangan atau belum dalam menyerap aspirasi masyarakat jawaban belum karena menurut anggota BPD hal tersebut tidak diperlukan sedangkan menurut masyarakat hal tersebut harus dilakukan supaya BPD bisa lebih maksimal dalam menyerap Aspirasi masyarakat.

Kesimpulan dari Indikator Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat dilihat dari wawancara dan observasi yang saya lakukan adalah Anggota BPD memang belum bekerja cukup aktif dalam memapung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan belum tersedianya wadah untuk masyarakat menyalurkan aspirasinya. Anggota BPD juga tidak berusaha menyaring papun aspirasi masyarakat. BPD juga belum pernah turun lapangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan juga tidak pernah menyiapkan wadah apapun unruk tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya, sehingga masyarakat merasa BPD tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi dengan baik.

5.2.2 Indikator Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yaitu melakukan Pengawasan terhadap seluruh pekerjaan Kepala desa dan mengawasi setiap kinerja yang sudah dicapai kepala desa.

Dan pada tipe ini diambil item penilaian sebanyak dua item yang dijadikan landasan pertanyaan pada wawancara terhadap informan dengan pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu Bagaimana cara anggota BPD Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa?”

Berikut hasil wawancara dengan informan yang berasal dari masyarakat desa Talontam Benai yang mengatakan bahwa:

Menurut saya anggota BPD harus objektif dalam bekerja, BPD harus benar-benar mengawasi bagaimana kinerja Kepala desa, kalau Kepala desa salah harus ditegur.

(Wawancara, 28 Agustus 2020)

Untuk pertanyaan sama, ini jawaban informan dari masyarakat Talontam Benai yang mengatakan bahwa:

Menurut saya kinerja BPD memang harus diawasi karena itu memang merupakan salah satu fungsi BPD dan BPD mengawasi apapun yang dikerjakan kepala desa.

(Wawancara, 28 Agustus 2020)

Menurut wawancara diatas masyarakat sangat baharap BPD bisa bekerja dengan efektif dalam mengawasi kinerja Kepala desa supaya masyarakat merasa nyaman dan tidak ada kecuriaan terhadadap pemerintah desa. BPD juga harus lebih teliti dalam hal keuangan desa supaya tidak penyelewengan

Sedangkan informan dari Kepala Desa Talontam Benai memberikan tanggapakan dari pertanyaan ini yaitu :

Saya sebagai kepala desa memberikan kewenangan sepenuhnya kepada kepala desa untuk menjalankan fungsinya untuk mengawasi kinerja kepala desa dan saya berharap BPD bisa bekerja dengan maksimal.

(Wawancara, 29 Agustus 2020)

Sedangkan menurut informan dari masyarakat desa Talontam Benai lain yang mengatakan bahwa:

Menurut saya BPD memang difungsikan untuk mengawasi juga kinerja kepala desa, dan menurut saya BPD perlu melakukan penyelidikan rutin dan pengawasan secara diam-diam.

(Wawancara 28 Agustus 2020)

Dari wawancara dengan Kepala desa dan masyarakat diatas mereka mengatakan kepala desa memberikan kewenangan penuh untuk BPD melakukan pengawasan terhadap kinerjanya, dan kepala desa juga berharap kepala desa bisa bekerja secara konsisten supaya fungsinya bisa sebagai melakukan pengawasan terhadap kepala desa bisa terlaksana dengan baik.

Kemudian tanggapan lain juga dikemukakan oleh informan dari BPD yang mengatakan bahwa:

Kami sebagai anggota BPD sudah melakukan pengawasan terhadap kinerja BPD, kami juga mengawasi semua gerak gerik kepala desa, dan mengawasi penggunaan dana desa oleh kepala desa.
(Wawancara, 29 Agustus 2020)

Sedangkan tanggapan dari informan yang anggota BPD lainnya yang mengatakan bahwa:

Kami sudah rutin melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan saya rasa kamu sudah secara optimal melaksanakannya, dan kami juga bekerja secara objektif tidak memandang status dan kekuasaan.
(Wawancara, 29 Agustus 2020)

Dari wawancara diatas tanggapan mereka semua mengatakan sudah bekerja secara optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Menurut anggota BPD, mereka sudah rutin melaksanakan penyelidikan terhadap kinerja BPD, dan mereka sudah bekerja secara objektif dan tidak memandang kekuasaan.

Selanjutnya untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan “Menurut Bapak/ibu apa yang harus anggota BPD lakukan jika kinerja kepala desa tidak baik ?”

Berikut hasil wawancara dengan informan yang Masyarakat desa Talontam benai yang mengatakan bahwa:

Menurut saya Jika kinerja kepala desa tidak Baik maka BPD harus segera menindak lanjuti hal tersebut supaya bisa ditindaklanjuti bagaimana untuk kedepannya.BPD harus transparan terhadap hal tersebut dan tidak ada yang ditutupi.Tidak seperti yang sudah-sudah dimana BPD tidak segera menindak lanjuti hal tersebut

(Wawancara, 28 Agustus 2020)

Sama dengan pertanyaan informan diatas, informan dari Masyarakat desa Talontam Benai mengatakan bahwa:

Yang jelas anggota BPD harus objektif dan harus segera melakukan tindakan terhadap kinerja kepala desa tersebut, supaya kondisi desa bisa kondusif dan desa bisa berkembang, dan tidak ada kecurangan dalam pemerintah desa, karena selama ini yang saya lihat ada konfrontasi antara kepala desa dan BPD.

(Wawancara, 26 Agustus 2020)

Begini pula jawaban dari informan yang berasal dari masyarakat desa talontam benai yang lain yang mengatakan bahwa:

Menurut saya jelas kepala desa perlu ditegur supaya bisa meningkatkan kinerjanya, dan BPD harus segera melakukan tindakan, dan tidak boleh ada yang ditutupi dari masyarakat semuanya harus transparan yang mana selama ini tidak transparansi terhadap hal tersebut, yang mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui kecurangan apasaja yang terjadi.

(Wawancara 26 Agustus 2020)

Dari wawancara diatas tanggapan mereka mengatakan Harus ada transparansi keadaan jika kalau kinerja kepala desa kurang baik, masyarakat berharap tidak adanya kecurangan apapun dalam pemerintah desa sehingga desa bisa berkembang dengan baik. Dimana selama ini BPD tidak transparan terhadap hal tersebut dan masyarakat menganggap BPD ada konfrontasi bersama kepala.

Sedangkan Tanggapan dari Kepala desa yang mengatakan bahwa:

Saya sebagai kepala desa seperti yang saya bilang tadi, saya memberikan kewenangan penuh kepada BPD untuk mengawasi kinerja saya sebagai kepala

desa, jika pada suatu saat nanti kinerja saya ternyata tidak baik maka saya bersedia diadili atau ditegur oleh BPD..

(Wawancara, 29 Agustus 2020)

Sedangkan tanggapan dari BPD yang mengatakan bahwa:

Kami sebagai anggota BPD pasti akan menegur kepala desa jika ternyata kinerja kepala desa tidak baik.

(Wawancara 25 Agustus 2020)

Dari wawancara dengan Kepala desa dan BPD diatas kepala desa sudah memberikan kewenangan kepada BPD untuk mengawasi kinerjanya, jika kinerjanya tidak baik maka kepala desa bersedia ditegur oleh BPD.

Dari hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan berbeda jawabannya dan peneliti juga melakukan observasi dilapangan bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat desa sesuai dengan hasil observasi dilapangan dan sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang mengatakan Harus ada transparansi keadaan jika kalau kinerja kepala desa kurang baik, masyarakat berharap tidak adanya kecurangan apapun dalam pemerintah desa sehingga desa bisa berkembang dengan baik. Dimana selama ini BPD tidak transparan terhadap hal tersebut dan masyarakat menganggap BPD ada konfrontasi bersama kepala.

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara dengan perangkat desa, masyarakat dan observasi peneliti dilapangan jawabannya sama. Jawaban dari hasil wawancara masyarakat dengan hasil observasi peneliti dilapangan sama. Jadi hasilnya adalah Analisis fungsi Badan Permusyawaratan desa (BPD) belum tercipta dengan baik

Dilihat dari semua item penilaian untuk melihat Analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , maka sesuai dengan indikator Berdasarkan UU. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 31 mengemukakan tentang fungsi BPD yang mana peneliti menjadikan ketiga fungsi ini sebagai Kerangka Pemikiran yang dijadikan acuan dalam penelitian Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketiga variabel tersebut adalah Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa menunjukan Analisis fungsi Badan Permusyawaratan tidak tercipta dengan baik, dengan beberapa kendala diantaranya Kinerja Anggota BPD dalam membahas rancangan tentang peraturan desa Tidak efektif kerena menurut mereka anggota BPD bekerja tidak terlalu aktif sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya fungsi BPD satu ini. BPD tidak Juga Mengajukan Ide-ide yang cemerlang untuk kepentingan masyarakat, padahal jika mereka mengajukan nya maka akan baik bagi Masyarakat. Anggota BPD juga belum pernah dan belum bisa mengajukan peraturan desa yang baik, karena anggota BPD dinilai tidak kompeten dalam bekerja dan sering tidak menghadiri rapat desa sehingga mereka tidak bisa mengajukan peraturan desa yang baik. Anggota BPD dinilai juga tidak efektif dan tidak mampu dalam bekerja. Anggota BPD dinilai belum bekerja cukup aktif dalam memapung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan belum tersedianya wadah untuk masyarakat menyalurkan aspirasinya. Anggota BPD juga tidak berusaha menyaring papun aspirasi masyarakat. BPD belum pernah turun lapangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan juga

tidak pernah menyiapkan wadah apapun unruk tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya, sehingga masyarakat merasa BPD tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi dengan baik. Masyarakat sangat berharap BPD bisa bekerja dengan efektif dalam mengawasi kinerja Kepala desa supaya masyarakat merasa nyaman dan tidak ada kecuriaan terhadap pemerintah desa. BPD juga harus lebih teliti dalam hal keuangan desa supaya tidak penyelewengan. Harus ada transparansi keaadaan jika kalau kinerja kepala desa kurang baik, masyarakat berharap tidak adanya kecurangan apapun dalam pemerintah desa sehingga desa bisa berkembang dengan baik. Dimana selama ini BPD tidak transparan terhadap hal tersebut dan masyarakat menganggap BPD ada konfrontasi bersama kepala.

Dan dari jawaban hasil wawancara yang peneliti dapatkan, peneliti mendapat jawaban dari setiap item penilaian dari setiap indikator yang ada, Dan peneliti dapat menyimpulkan mengenai Analisis Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPD) belum tercipta dengan baik dapat dilihat berikut ini:

1. Kesimpulan dari Indikator Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa melalui wawancara dan observasi yang saya lakukan adalah Kinerja Anggota BPD dalam membahas rancangan tentang peraturan desa Tidak efektif kerena menurut mereka anggota Bpd bekerja tidak terlalu aktif sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya fungsi BPD satu ini. BPD tidak Juga Mengajukan Ide-ide yang cemerlang untuk kepentingan masyarakat, padahal jika mereka mengajukan nya maka akan baik bagi Masyarakat. Dan juga anggota BPD

belum pernah dan belum bisa mengajukan peraturan desa yang baik, karena anggota BPD dinilai tidak kompeten dalam bekerja dan sering tidak menghadiri rapat desa sehingga mereka tidak bisa mengajukan peraturan desa yang baik. Anggota BPD dinilai juga tidak efektif dan tidak mampu dalam bekerja. Menurut peneliti anggota BPD memang belum melaksanakan fungsinya membahas dan menyepakati perturan desa dengan baik, masih ada beberapa anggota BPD yang belum efektif dalam bekerja dan tidak kompeten dalam bekerja. .

2. Kesimpulan dari Indikator Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat dilihat dari wawancara dan observasi yang saya lakukan adalah Anggota BPD memang belum bekerja cukup aktif dalam memapung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan belum tersedianya wadah untuk masyarakat menyalurkan aspirasinya. Anggota BPD juga tidak berusaha menyaring papun aspirasi masyarakat. BPD juga belum pernah turun lapangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan juga tidak pernah menyiapkan wadah apapun unruk tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya, sehingga masyarakat merasa BPD tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi dengan baik.
3. Untuk Jawaban Indikator ketiga yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Dari hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan berbeda jawabannya dan peneliti juga melakukan observasi dilapangan bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat desa sesuai

dengan hasil observasi dilapangan dan sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang mengatakan Harus ada transparansi keadaan jika kalau kinerja kepala desa kurang baik, masyarakat berharap tidak adanya kecurangan apapun dalam pemerintah desa sehingga desa bisa berkembang dengan baik. Dimana selama ini BPD tidak transparan terhadap hal tersebut dan masyarakat menganggap BPD ada konfrontasi bersama kepala desa.

Kesimpulan dari Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui wawancara dan observasi yang peneliti lakukan melalui Tiga indikator diatas didapatkan hasilnya bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum tercipta dengan baik. Hasil tersebut peneliti dapatkan dari hasil analisis peneliti melalui wawancara peneliti dengan Para Masyarakat, BPD dan Kepala Desa.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa data yang telah peneliti lakukan mengenai Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Talontam Benai Kabupaten Kuantan Singgingi, maka peneliti mengambil kesimpulan, bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Talontam Benai Kabupaten Kuantan Singgingi belum tercipta dengan baik.

6.1 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai masukan terhadap Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Talontam Benai Kabupaten Kuantan Singgingi adalah:

1. Untuk Kedepannya Diharapkan BPD dapat melaksanakan Ketiga fungsinya ini dengan baik sehingga bisa tercipta permerintahan yang baik.
2. BPD juga harus bisa lebih bisa meningkatkan kinerja supaya tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan didesa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albert, 2002. *Otonomi Daerah*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.
- Anwar Khairul, 2003. *Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah*, UNRI Pers, Pekanbaru.
- Budihardjo Miriam, 1993. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kencana Inu, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nazir Muhammad, 2004. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. Grafindo, Jakarta.
- Ndraha Taliziduha, 2001. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rasyid Ryas, 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Santosa Budi, 2003. *Desa Dan Pemerintahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Santowo Purwo, 2003. *Pembaharuan Desa Secara Pertisipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Setyawan Dharma, 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soekanto Soejono, 1991. *Sosiologi Sebagai Suatu Pendekatan Perilaku*, Sinar Baru, Bandung.
- Sumadilaga Ruman, 2007. *Peradaban Sosiologi Peresaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Sumardjan, Selo, 2003. *Perkembangan Kehidupan Pedesaan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutoro, Eko, 2003. *Pembaharuan Pemerintahan Desa*, IRE Press, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- The Liang Gie, 1995. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Liberti, Yogyakarta.
- Thoha Miftah, 2005. *Kepemimpinan Dan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*, Sinar Baru, Bandung.
- Widjaja Haw, 2005. Pemerintahan Desa Marga, Grafindo Persada, Jakarta.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendagri No. 110 Tahun 2016

Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DI DESA TALONTAM BENAI KECAMATAN BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Islam Kuantan Singingi, fakultas ilmu sosial, maka saya memohon izin kepada bapak/ ibu bersedia untuk diwawancarai. Wawancara ini hanya bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang behubungan dengan penyusunan skripsi penulis, maka dari itu bapak/ ibu tidak perlu laru- ragu memberikan jawaban yang sejurnya, artinya semua jawaban yang diberikan bapak/ibu adalah benar dan ajawaban yang diminta adalah sesuai dengan kondisi yang terjadi selama ini. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini, atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr.Wb.

I. Identitas Informan di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singgingi.

Nama	:	
Jenis Kelamin	:	a. Laki- laki b. Perempuan
Umur	:	
Jabatan	:	
Tanggal Wawancara	:	

A. Indikator Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Kinerja Anggota BPD dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa?

Jawaban:.....

.....

.....

.....

2. Menurut Bapak/Ibu apakah anggota BPD sudah mengajukan peraturan desa yang baik ?

Jawaban:.....

B. Indikator Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat

3. Menurut Bapak/Ibu Apakah Fungsi BPD dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa tercipta dengan baik?

Jawaban:.....

4. Menurut Bapak/Ibu Apakah Anggota BPD pernah turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat?

Jawaban:.....

C. Indikator Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

5. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana cara anggota BPD Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa?

Jawaban:.....

.....
.....
.....
.....

-
.....
6. Menurut Bapak/ibu apa yang harus anggota BPD lakukan jika kinerja kepala desa tidak baik?

Jawaban:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Dokumenter pelaksanaan Penelitian di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi



Gambar 1: Wawancara Peneliti dengan Anggota BPD Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi



Gambar 2: Kantor Kepala Desa Talontam Benai Kecematan Benai

Kabupaten Kuantan Singgingi



Gambar 3: Wawancara Peneliti dengan salah satu anggota BPD desa Talontam Benai



Gambar 4: Wawancara Peneliti dengan salah satu masyarakat desa Talontam Benai



Gambar 5: Wawancara Peneliti dengan Masyarakat Talontam Benai



Gambar 6: Wawancara Peneliti dengan salah satu Masyarakat desa Talontam Benai



Gambar 7: Wawancara Peneliti dengan salah satu anggota BPD desa Talontam Benai